THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL
https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index
P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

SEBARAN ANGKA KEMISKINAN YANG MENGAKIBATKAN KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Andrean Falah [1], Muhammad Ichlasul Amal[2], Lorenzo[3]
Universitas Sriwijaya; Jl. Masjid Al Gazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128 Nomor Telepon : (0711) 310004
e-mail: [1]andrean.falah975@gmail.com, [2]michlasulamal91@gmail.com, [3]lorenzoviano2713@gmail.com

Abstract

The phenomenon revealed by this research indicates that the uneven distribution of poverty figures within society leads to wide social disparities, impacting the quality of life and individual opportunities in various aspects of life. When poverty is concentrated in specific areas or groups, access to vital resources such as education, healthcare, and infrastructure becomes uneven, causing difficulties in accessing viable economic opportunities. The aim of this research is to analyze the distribution of poverty and its impact on social inequality while highlighting the importance of geographical distribution in designing policies to reduce poverty and social disparities. The methodology employed in this study is legal research with a normative juridical approach, utilizing secondary data and applying descriptive-analytical methods. The research findings indicate that poverty can be understood in two main concepts: absolute and relative poverty, with measurements conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS) using the basic needs approach and the Head Account Index. Structural poverty emerges as a major factor that is challenging to address, especially in regions with high population density such as Java and Bali. The uneven distribution of poverty can result in widespread social disparities, affecting the quality of life and individual opportunities in various aspects of life, thus necessitating a comprehensive approach to addressing social inequality.

Keyword: *Poverty distribution, Social inequality impact, Geographical policy design*

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan memang sangat nyata sebagai realitas yang kompleks dan terus menerus mengekspresikan keadaan miskin. Tingkat kemiskinan tidak lagi hanya masalah kurangnya makanan, melainkan bagi beberapa anggota masyarakat sudah mencapai tingkat ekstrem di mana mereka benar-benar kehabisan dan tidak memiliki makanan sama sekali. Banyak orang yang tersungkur karena tidak bisa menahan kelaparan dan kekurangan gizi, yang mempercepat menuju kematian dini. Ini adalah proses kematian yang perlahan namun kejam.

Seperti yang dikemukakan oleh pemikir Martin Heidegger[1], bagi banyak orang, waktu sering dirasakan sebagai perjalanan menuju kematian, atau yang dalam bahasa Jerman disebut sebagai "Zeit zum Tode". Namun, tantangan hidup seperti kelaparan dan kesulitan ekonomi dapat membuat perjalanan ini terasa lebih berat. Kehancuran ekonomi dapat menghancurkan harapan seseorang, membuat mereka merasa kalah dan tanpa daya. Hal ini dapat memicu perasaan fatalistik, di mana seseorang merasa bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari tekanan situasi.

Meskipun tidak semua kasus bunuh diri disebabkan oleh masalah ekonomi, beberapa di antaranya memang dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi yang sulit. Tindakan bunuh diri yang didorong oleh masalah ekonomi sangat tragis karena menunjukkan hilangnya rasa kemanusiaan dan kepedulian. Kematian korban akibat kemiskinan juga mengungkapkan kemiskinan lain, yaitu kemiskinan moral kolektif bangsa dan kelemahan dalam sikap peduli. Para pemimpin juga sering kehilangan sensitivitas terhadap nasib rakyat yang berjuang dengan kemiskinan. Selain itu, sebagian besar dana yang dialokasikan untuk program peningkatan kesejahteraan warga miskin sering disalahgunakan dalam praktik korupsi yang merajalela, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini menunjukkan adanya kemiskinan moral di kalangan elit bangsa, di mana nilai-nilai seperti integritas dan kepedulian terhadap rakyat seringkali terabaikan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Penjelasan intelektual tentang dimensi dan penyebab kemiskinan secara sosiologis melibatkan pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa dimensi: pertama, kemiskinan absolut, yang mengacu pada kondisi di mana seseorang berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, tempat tinggal, atau pelayanan kesehatan. Dimensi ini sering menjadi fokus program bantuan sosial pemerintah. Kedua, kemiskinan relatif, terjadi akibat ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan yang tidak merata bagi seluruh masyarakat, menciptakan perbedaan sosio-ekonomi meskipun ada kemajuan ekonomi secara umum. Ketiga, kemiskinan kultural, disebabkan oleh mentalitas atau perilaku masyarakat seperti boros, malas, atau kurang kreatif dalam memanfaatkan bantuan dan kesempatan yang ada, menghambat kemajuan ekonomi individu dan keluarga. Keempat, kemiskinan struktural, timbul akibat struktur sosial dan

[1] Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *16*(3).

budaya yang tidak adil, seperti sistem ekonomi yang terlalu berorientasi pada keuntungan atau tingkat pengangguran tinggi yang didominasi oleh tenaga kerja tidak terampil[2].

Teori Oscar Lewis mengenai kemiskinan, keterbelakangan, dan kesenjangan ekonomi menyoroti bahwa penderitaan ekonomi yang berlarut-larut dapat menghasilkan kebudayaan kemiskinan dan ketertinggalan di masyarakat. Faktor-faktor seperti fokus berlebihan pada keuntungan dalam sistem ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi dengan banyak tenaga kerja tidak terampil, rendahnya upah pekerja, dan kegagalan individu dengan pendapatan rendah untuk meningkatkan partisipasi dalam organisasi sosial, ekonomi, dan politik, semuanya berkontribusi terhadap kondisi kemiskinan yang berkelanjutan.

Selain itu, aspek-aspek seperti dominasi sistem keluarga bilateral dan nilai-nilai yang dianut oleh kelas berkuasa yang menekankan akumulasi kekayaan dan mobilitas vertikal juga turut mempengaruhi penciptaan lingkungan sosial yang mendukung kemiskinan dan ketidaksetaraan. Penjelasan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam menentukan kondisi kemiskinan dalam suatu masyarakat, mengilustrasikan bagaimana berbagai dimensi kemiskinan saling terkait dan berdampak pada keseluruhan struktur dan dinamika sosial.

Pada Maret 2023, tingkat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,46 juta orang dibandingkan dengan September 2022. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi kemiskinan di Indonesia selama periode tersebut. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin termasuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, seperti program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian.[3]

Salah satu sumber yang dikutip, Kominfo, melaporkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 1,19 juta orang pada periode yang sama. Data ini menunjukkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Selain itu, sumber lain menyebutkan bahwa ada semangat dan

[2] Rosyadi, K. (2021, September). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19; Refleksi Sosiologis. In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 1, No. 1).

[3] CNBC Indonesia, (2023). Total Orang Miskin RI per Maret 2023 Jadi 25,9 Juta Jiwa, diakses pada Total Orang Miskin RI per Maret 2023 Jadi 25,9 Juta Jiwa (cnbcindonesia.com)

komitmen untuk mengatasi kemiskinan, yang tercermin dari berbagai program dan inisiatif yang diluncurkan untuk membantu orang-orang miskin dan rentan di Indonesia[4].

Referensi berita dari CNBC Indonesia menyebutkan bahwa jumlah orang miskin pada Maret 2023 mencapai 25,9 juta jiwa, yang menandakan adanya peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun, data ini juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, upaya untuk mengurangi kemiskinan masih terus dilakukan.

Meskipun Lewis tidak memberikan jawaban definitif atas debat panjang mengenai kemiskinan, dia memberi kesadaran bahwa kemiskinan sebenarnya dan ketimpangan timbul dari masalah kultural dan struktural dalam masyarakat. Kemiskinan bukanlah masalah sederhana yang hanya disebabkan oleh satu faktor seperti budaya. Sebaliknya, berbagai faktor berperan dalam menciptakan dan memperpetuasi kemiskinan. Pertama, sejarah kolonialisme memberikan warisan yang memengaruhi struktur sosial dan ekonomi negara-negara berkembang. Kedua, struktur sosial seperti sistem kasta atau praktik patronase juga berkontribusi dalam membuat akses terhadap kesempatan dan sumber daya tidak merata. Ketiga, ketidakadilan dalam sistem serta kurangnya kesempatan yang sama bagi semua orang memperkuat ketidaksetaraan dan kemiskinan. Keempat, kebijakan negara yang tidak memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin dapat memperdalam kesenjangan sosial. Terakhir, masuknya kapitalisme dan globalisasi mengubah cara negara-negara berkembang berinteraksi dengan ekonomi global, yang bisa membawa peluang namun juga meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Semua faktor ini saling terkait dan bisa saling memperkuat. Misalnya, kapitalisme dan globalisasi bisa memperkuat ketidaksetaraan sosial yang sudah ada dalam masyarakat karena cenderung menguntungkan orang-orang yang sudah memiliki kekayaan dan kekuasaan.

Dalam konteks kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, masalah struktural menjadi salah satu faktor utama yang sulit diatasi, sehingga masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di samping itu, faktor budaya juga menjadi kendala yang signifikan, terutama di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya keberanian baik dalam hal struktural maupun kultural untuk mengatasi permasalahan ini.

[4] Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)

Amartya Sen[5], seorang Guru Besar Filsafat dan Ekonomi di Harvard University menyoroti pentingnya dialog kebudayaan sebagai sarana untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Menurutnya, kebudayaan bukanlah hanya sekedar warisan bersejarah, melainkan merupakan kumpulan nilai, pemikiran, agama, pandangan, sikap, teknologi, dan perasaan masyarakat yang memiliki potensi ekonomi yang beragam. Dalam pandangannya, kebudayaan bukanlah entitas statis, tetapi merupakan gerakan nilai yang memerlukan arah dan aktualisasi.

Dalam konteks ekonomi, kebudayaan berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang transformatif. Hal ini diperkuat dengan pandangannya bahwa kebudayaan juga merupakan jalan keluar dari kebuntuan peradaban, termasuk dalam mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Oleh karena itu, memasukkan aspek kebudayaan dalam pembangunan ekonomi menjadi esensial untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengadopsi strategi kebudayaan yang tepat. Ini mencakup keberanian untuk membuka diri terhadap pengaruh luar tanpa kehilangan identitas dan kecerdasan lokal. Strategi ini diperlukan agar kebudayaan dapat menjadi motor penggerak dalam mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Ada dua kelompok orang dalam masyarakat: satu kelompok hidup dalam kemewahan, sementara yang lain hidup dalam keterbatasan. Orang-orang kaya memiliki banyak harta, sementara yang lainnya hidup dengan sangat sedikit. Ini menciptakan perbedaan besar antara mereka. Perbedaan ini sangat membuat khawatir. Hal ini karena perbedaan besar ini membuat orang merasa tidak adil. Misalnya, seseorang yang sangat kaya mungkin memiliki mobil mewah, rumah besar, dan segala macam barang mewah. Sementara itu, orang yang miskin mungkin tidak mampu membeli makanan yang cukup atau tempat tinggal yang layak. Perbedaan ini juga membuat masalah dalam kebangsaan. Nasionalisme, yang berarti cinta pada negara dan bangsa, bisa merosot. Ini karena orang-orang yang hidup dalam kemiskinan merasa tidak dihargai atau diabaikan oleh negara mereka. Mereka mungkin merasa tidak memiliki bagian dari identitas nasional mereka. Ini menciptakan lingkungan yang buruk bagi bangsa. Kemiskinan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini membuat bangsa kehilangan

[5] Ibid

identitasnya dan sulit untuk membangun semangat nasionalisme. Jika masalah ini tidak diatasi, maka negara itu bisa mengalami keruntuhan dan kehilangan jati diri nasionalnya[6].

METODOLOGI

Metode penelitian dalam tulisan ini telah dijelaskan tentang cara mempelajari masalah hukum dan mencari solusinya. Metode yang digunakan oleh penulis disebut "penelitian hukum" yang berfokus pada hukum. Pendekatan yang digunakan disebut "metode yuridis normatif". Data tidak dikumpulkan langsung dari lapangan oleh penulis, melainkan sumber data sekunder seperti dokumen hukum yang sudah ada digunakan. Ini bisa berupa undang-undang, keputusan pengadilan, atau tulisan-tulisan tentang hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aturan-aturan hukum yang ada dan bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktiknya. Penulis ingin melihat bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan ini, metode penelitian deskriptif analitis digunakan oleh penulis. Hukum yang berlaku tidak hanya dideskripsikan oleh penulis, tetapi juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum. Penulis berusaha untuk mengaitkan aturan hukum dengan masalah yang telah diidentifikasi.

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan cara membaca dan menganalisis penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang telah ada digunakan oleh penulis sebagai sumber referensi untuk mendukung analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan dapat dipahami dalam dua konsep utama: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yang keduanya berkaitan dengan tingkat pendapatan individu atau keluarga. Kemiskinan secara absolut merujuk pada kondisi di mana pendapatan seseorang atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan, artinya pendapatan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, perumahan, dan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa individu atau keluarga yang mengalami kemiskinan absolut tidak memiliki akses atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dibutuhkan untuk menjaga kehidupan yang layak.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua pendekatan untuk mengukur kemiskinan: pendekatan kebutuhan dasar (Basic Need) dan pendekatan Head Account Index.

[6] Musa Asy'arie, 2011, "Kebangkitan Nasional, Perspektif Kebudayaan," Kompas.

Pendekatan kebutuhan dasar mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, dan pendidikan. Sementara itu, pendekatan Head Account Index menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang menghitung jumlah penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dalam hal nilai Rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. BPS juga mempertimbangkan kebutuhan minimum makanan, yang tidak hanya terbatas pada beras tetapi mencakup kebutuhan dasar secara menyeluruh untuk menilai dan mengukur tingkat kemiskinan di masyarakat. Penilaian ini membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan[7].

Kemiskinan relatif adalah ketika seseorang menghasilkan uang di atas garis kemiskinan, tetapi masih merasa miskin karena pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Misalnya, seseorang mungkin memiliki pekerjaan dan cukup uang untuk makan dan tempat tinggal, tetapi dia masih merasa kurang karena tidak bisa membeli hal-hal yang dimiliki oleh tetangganya yang lebih kaya. Hal ini biasanya terjadi karena ada masalah dalam pembangunan yang tidak merata. Artinya, beberapa orang bisa maju dan mendapatkan lebih banyak uang, tetapi banyak orang lainnya tertinggal. Misalnya, mungkin ada daerah di mana pemerintah membangun sekolah dan jalan baru, tetapi daerah lainnya masih miskin dan tidak mendapatkan bantuan serupa.

Dalam tulisan ini, penulis tidak menggunakan konsep kemiskinan relatif karena itu tidak memiliki standar yang pasti. Dengan kata lain, tidak ada aturan yang jelas untuk mengukur siapa yang dianggap miskin secara relatif. Ini membuat sulit untuk menetapkan siapa yang termasuk dalam kategori kemiskinan relatif dan siapa yang tidak[8].

Kemiskinan kultural terjadi ketika orang atau kelompok masyarakat memiliki sikap dan nilai-nilai yang membuat mereka enggan untuk berusaha meningkatkan kehidupan mereka. Meskipun mungkin ada bantuan dari luar, mereka merasa sudah cukup dan tidak merasa perlu berubah. Mereka mungkin tidak mau mengikuti perubahan zaman atau tidak mau meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga pendapatan mereka tetap rendah dibandingkan

[7] Khalidya, Rakhmi (2007) "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di berbagai daerah (propinsi) di Indonesia", Tesis pada program Pascasarjana Bidang Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. (tidak diterbitkan).
[8] Prasodjo, I. (2017). Perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial regional di Indonesia 2011-2015. *Jurnal Ekonomi*, *22*(1), 22-36.

dengan standar umum. Kelompok ini biasanya tidak merasa miskin dan tidak ingin dianggap sebagai orang miskin. Mereka mungkin memiliki keyakinan atau tradisi tertentu yang membuat mereka merasa puas dengan keadaan mereka saat ini, meskipun menurut standar umum mereka masih dianggap miskin. Dalam tulisan ini, konsep kemiskinan kultural tidak digunakan karena tidak ada standar yang jelas untuk menilai apakah seseorang atau kelompok masyarakat itu benar-benar miskin secara kultural. Ini membuat sulit untuk mencakup mereka dalam berbagai indikator atau kebijakan pembangunan karena mereka memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda.

Selama periode September 2012 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia umumnya mengalami penurunan, artinya jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan dan persentase mereka dari total populasi berkurang. Namun, ada beberapa bulan di mana terjadi kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada bulan September 2013, Maret 2015, dan September 2022, terjadi peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin. Ini terjadi karena harga barang kebutuhan pokok naik, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat menurun, sehingga lebih banyak orang berada di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, pada bulan Maret 2020 dan September 2020, terjadi peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin karena adanya pembatasan mobilitas penduduk akibat pandemi Covid-19. Pembatasan ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau pendapatan mereka menurun karena bisnis dan kegiatan ekonomi terganggu. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan kemiskinan pada beberapa bulan tertentu karena faktor-faktor seperti kenaikan harga barang atau dampak pandemi, tren umumnya menunjukkan penurunan kemiskinan selama periode yang disebutkan[9].

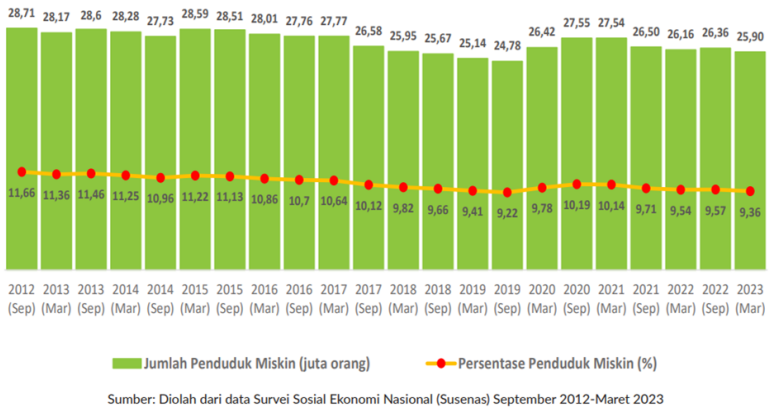

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

[9] Badan Pusat Statistik, 2023.

Tingkat kemiskinan di Indonesia lebih tinggi di bagian timur, meskipun banyak penduduk miskin tinggal di wilayah barat yang lebih padat penduduknya seperti Jawa dan Bali. Tapi, sebagian besar penduduk miskin Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, lebih dari 62,94% dari mereka. Jawa khususnya adalah pusat kemiskinan di Indonesia. Penyebabnya bisa dijelaskan dengan kepadatan penduduk yang tinggi di pulau Jawa dibandingkan dengan daerah lain. Semakin banyak orang per kilometer persegi atau per hektar, semakin sedikit lahan yang tersedia untuk pertanian atau pembangunan pabrik dan kegiatan ekonomi lainnya. Ini berarti peluang kerja dan sumber pendapatan menjadi terbatas, sehingga lebih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan[10].

Penjelasan ini menggambarkan bahwa pusat kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti pulau Jawa dan Bali. Faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya kemiskinan di wilayah tersebut adalah terbatasnya lahan untuk pengembangan ekonomi dan kesempatan kerja akibat tingginya kepadatan penduduk. Semakin banyak penduduk yang harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan lapangan kerja, semakin besar pula persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan distribusi kemiskinan secara regional dan faktor-faktor lingkungan dalam merancang kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Penekanan pada kesetaraan sosial sebagai pilar ketiga dalam administrasi publik, di belakang efisiensi dan ekonomi, menunjukkan pentingnya menjadikan kesetaraan sebagai fokus utama dalam perubahan kebijakan publik di seluruh dunia. Hal ini diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan yang tidak hanya berdampak di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Meskipun terdapat upaya dalam kebijakan internasional untuk mencapai kesetaraan dalam perlakuan terhadap individu, realitasnya adalah bahwa tidak ada dua orang yang diperlakukan secara sama. Dengan demikian, kesetaraan sosial menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan kebijakan publik dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan[11].

Dalam konteks ini, kesetaraan sosial berarti memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, peluang, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan. Ini mencakup perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif

[10] Tambunan, Tulus T.H. (2001) Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
[11] Nijaki, L. K. (2015). Justifying and juxtaposing environmental justice and sustainaility: towards an inter-generational and intra-generational analysis of environmental equity in public administration. Public Administration Quarterly, 39(1), 85-116.

terhadap semua orang, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Kesetaraan sosial juga mencakup penghapusan ketimpangan struktural yang dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa kebijakan publik tidak memihak atau menguntungkan kelompok tertentu secara tidak adil.

Definisi keadilan sosial membantu kita memahami bagaimana mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan di berbagai negara di seluruh dunia. Ketika kita membaca tentang keadilan sosial dalam literatur, itu membantu kita menemukan cara-cara baru dan cerdas untuk membuat kebijakan yang dapat memperbaiki situasi ini. Keadilan sosial berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, terutama yang rentan terhadap kemiskinan. Ketika literatur mendefinisikan keadilan sosial, itu seringkali membahas perlindungan untuk kelompok-kelompok ini. Orang-orang dan keluarga yang berada dalam kelas-kelas ekonomi bawah ini biasanya yang paling menderita karena kemiskinan. Meskipun sudah ada upaya kebijakan dan program untuk mengurangi ketidakadilan yang mereka hadapi, kita perlu terus memperbarui pendekatan kita agar lebih efektif[12].

Hasilnya, ketika ada kampanye presiden atau kampanye dari politisi lainnya seperti gubernur atau bupati, mereka sering berbicara tentang kebijakan yang bisa membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Mereka menekankan pentingnya kesetaraan sosial dalam platform mereka, tapi terkadang pesan mereka bisa jadi membingungkan atau bahkan mengabaikan apa sebenarnya arti kemiskinan dan ketidaksetaraan ini. Terkadang, politisi juga tidak banyak membahas masalah ini dalam kampanye mereka. Ini bisa terjadi terutama saat mereka berbicara tentang ketidaksetaraan ras, yang terkait dengan tidak adilnya distribusi, tidak hanya dalam hal uang dan harta, tapi juga dalam akses ke pendidikan tinggi dan kebutuhan hidup lainnya[13].

Umumnya diterima bahwa pendidikan berhubungan dengan peningkatan gaya hidup yang lebih baik, tetapi juga terbukti bahwa akses ke pendidikan yang lebih baik sedikit lebih mudah di daerah perkotaan daripada di pedesaan[14]. Selama beberapa dekade terakhir, upaya telah dilakukan untuk mengurangi kesenjangan di antara orang-orang di Indonesia, terutama di

[12] Gilder, G. (2013). Knowledge and power: The information theory of capitalism and how it is revolutionizing our world. Regnery Publishing.
[13] Unterhalter, E., & North, A. (2017). Education, poverty and global goals for gender equality: How people make policy happen. Routledge.
[14] Bassett, K. (1993). Urban cultural strategies and urban regeneration: a case study and critique. Environment and Planning A, 25(12), 1773-1788.

daerah-daerah di mana pendidikan lebih mudah diakses. Namun, kesenjangan masih terlihat di masyarakat. Di dalam tulisan yang dibuat oleh Unterhalter & North, masalah ini dibahas secara detail.

Pemimpin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta anggota pemerintahan, berusaha mengatasi masalah sosial ini dengan menggunakan tindakan afirmatif sebagai bagian dari kebijakan mereka. Namun, seringkali tindakan ini diambil hanya saat dibutuhkan, misalnya menjelang pemilihan umum atau untuk mendukung pengesahan undang-undang baru. Isu-isu seperti kesenjangan, kemiskinan, dan hak setiap warga untuk hidup yang layak seringkali menjadi pusat perhatian dalam kampanye politik. Namun, pada kenyataannya, usaha tersebut seringkali tidak menghasilkan perubahan besar yang diharapkan[15].

Tingkat kesenjangan antara orang-orang yang kaya dan yang miskin dapat memperlambat perkembangan ekonomi dan membuat sulit bagi orang dari latar belakang ekonomi rendah untuk maju secara sosial. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di daerah dengan banyak orang miskin cenderung lebih sulit untuk menjadi bagian dari kelas menengah dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh di tempat dengan campuran pendapatan yang lebih seimbang[16].

Menurut Thurow[17], kelas menengah biasanya merujuk pada kelompok orang dengan tingkat pendapatan yang sedang, bukan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita bisa memikirkan batasnya sebagai berikut: jika pendapatan rata-rata per orang di suatu negara adalah 100, maka kelas menengah biasanya mencakup orang-orang dengan pendapatan per orang antara 75 (75% dari 100) dan 125 (125% dari 100). Sementara itu, ada juga cara lain untuk mendefinisikan kelas menengah, seperti yang dikemukakan oleh Easterly. Dia membagi penduduk menjadi lima kelompok berdasarkan pengeluaran konsumsi, yang disebut quintiles. Kelas menengah menurut pendekatan ini adalah kelompok yang berada di tengah-tengah, yaitu di quintiles kedua, ketiga, dan keempat[18].

Banyak rekomendasi telah diajukan dalam sejarah untuk memperbaiki kondisi terkait kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kesetaraan sosial di seluruh dunia. Meskipun banyak kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah telah berhasil mengurangi kesenjangan,

[15] Suyanto, B. (2005). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin. Surabaya: Airlangga University Press.
[16] Jati, W. R. (2015). Less cash society: Menakar mode konsumerisme baru kelas menengah Indonesia. Jurnal Sosioteknologi, 14(2), 102-112.
[17] Thurow, L. C. (1987). A surge in inequality. Scientific American, 256(5), 30-37.
[18] Easterly, W, 2001. The Middle Class Consensus and Economic Development. Journal of Economic Growth 6, 317-35.

beberapa hanya memberikan perbaikan sementara[19]. Di era ekonomi global yang terus berubah, penting bagi kebijakan publik untuk terus beradaptasi dengan situasi dinamis ini. Meskipun konsep perlakuan yang adil untuk semua tanpa memandang faktor seperti ras, jenis kelamin, budaya, etnis, atau orientasi seksual merupakan ide yang baik, dalam praktiknya hal ini seringkali sulit dilakukan.

Penjelasan mengenai keterkaitan antara kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia, seperti yang diuraikan, memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana distribusi geografis dan kepadatan penduduk berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah. Pertama, wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti pulau Jawa dan Bali cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena terdapat lebih banyak kesempatan kerja dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, terutama di bagian timur Indonesia, mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena keterbatasan sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia.

Kedua, tingginya kepadatan penduduk di pulau Jawa dan Bali juga berdampak pada keterbatasan lapangan kerja dan sumber pendapatan. Persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghasilan menyebabkan sebagian penduduk terpinggirkan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi geografis dan kepadatan penduduk memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Ketiga, fakta bahwa sebagian besar penduduk miskin tinggal di pulau Jawa dan Bali mengindikasikan adanya kesenjangan sosial yang signifikan antara wilayah-wilayah padat penduduk dan wilayah-wilayah dengan kepadatan rendah. Kesimpulan ini menegaskan bahwa tidak hanya terdapat perbedaan geografis dalam kemiskinan, tetapi juga perbedaan dalam akses terhadap layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi antar wilayah.

Terakhir, penjelasan ini menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang berbasis regional dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Kebijakan yang efektif harus memperhatikan distribusi geografis kemiskinan, kepadatan penduduk, dan faktor lingkungan lainnya untuk memastikan adanya akses yang merata terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya yang diperlukan guna mengurangi kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan ini membutuhkan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan

[19] Lindert, P. H., & Williamson, J. G. (2003). Does globalization make the world more unequal?. In Globalization in historical perspective (pp. 227-276). University of Chicago Press.

karakteristik setiap daerah guna memastikan keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan dan meminimalkan kesenjangan sosial.

Sebaran angka kemiskinan yang tidak merata di masyarakat dapat menghasilkan ketimpangan sosial yang luas dan mempengaruhi kualitas hidup serta peluang individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika tingkat kemiskinan tinggi terkonsentrasi di daerah atau kelompok tertentu, hal ini cenderung menciptakan akses yang tidak merata terhadap sumber daya vital seperti pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, orang-orang dalam situasi kemiskinan sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi yang layak, termasuk pekerjaan yang stabil dan penghasilan yang memadai. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang besar antara mereka yang kaya dan miskin dapat menciptakan jurang sosial yang semakin lebar, memengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta menimbulkan ketidaksetaraan dalam hal kemampuan mengakses pendidikan dan pengembangan keterampilan. Akibatnya, sebaran yang tidak merata dari kemiskinan dapat mengakibatkan polarisasi sosial yang dapat merusak kohesi sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang dipicu oleh sebaran angka kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk kebijakan redistribusi ekonomi, investasi dalam layanan publik yang merata, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang inklusif.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa sebaran angka kemiskinan yang tidak merata di masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan sosial. Fenomena ini mempengaruhi kualitas hidup dan peluang individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika kemiskinan terkonsentrasi di daerah atau kelompok tertentu, akses terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur menjadi tidak merata. Akibatnya, orang-orang dalam kemiskinan menghadapi kesulitan dalam mengakses peluang ekonomi yang layak, termasuk pekerjaan stabil dan penghasilan memadai.

Selain itu, kesenjangan pendapatan yang besar antara kelompok kaya dan miskin menciptakan jurang sosial yang semakin lebar. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan mental, serta menghambat kemampuan individu untuk mengakses pendidikan dan pengembangan keterampilan. Dampak ini dapat merusak kohesi sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi ketimpangan sosial yang dipicu oleh sebaran kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah seperti kebijakan redistribusi ekonomi, investasi dalam layanan publik yang merata, serta pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang inklusif menjadi penting. Pendekatan ini harus memperhitungkan kompleksitas dan beragamnya faktor yang memengaruhi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta menerapkan strategi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayah yang terkena dampak. Sehingga, upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk menerapkan solusi yang holistik dan berkelanjutan guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023).

Bassett, K. (1993). Urban cultural strategies and urban regeneration: a case study and critique. *Environment and Planning A*, *25*(12), 1773–1778.

CNBC Indonesia. (2023). *Total Orang Miskin RI per Maret 2023 Jadi 25,9 Juta Jiwa*. Total Orang Miskin RI per Maret 2023 Jadi 25,9 Juta Jiwa (cnbcindonesia.com)

Easterly, W. (2001). The Middle Class Consensus and Economic Development. *Journal of Economic Growth*, *6*(3), 17–35.

Gilder, G. (2013). *Knowledge and power: The information theory of capitalism and how it is revolutionizing our world.* Regnery Publishing.

Jati, W. R. (2015). Less cash society: Menakar mode konsumerisme baru kelas menengah Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, *14*(2), 102–112.

Khalidya, R. (2007). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di berbagai daerah (propinsi) di Indonesia*. Universitas Indonesia.

Kominfo. (n.d.). Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)

Lindert, P. H., & W. (2003). *Does globalization make the world more unequal?. In Globalization in historical perspective (pp. 227-276)*. University of Chicago Press.

Musa Asy'arie. (2011). *Kebangkitan Nasional, Perspektif Kebudayaan*. Kompas.

Nijaki, L. K. (2015). Justifying and juxtaposing environmental justice and sustainaility: towards an inter-generational and intra-generational analysis of environmental equity in public administration. *Public Administration Quarterly*, *39*(1), 85–116.

Prasodjo. (2017). Perkembangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial regional di Indonesia 2011-2015. *Jurnal Ekonomi*, *22*(1), 22–36.

Rosyadi, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur Pada Masa dan Pasca Pandemi Covid-19; Refleksi Sosiologis. *In Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, *1*(1).

Suyanto, B. (2005). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin. Surabaya*. Airlangga University Press.

Syawie. (2011). Kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, *16*(3).

Tambunan, T. T. . (2001). *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Thurow, L. C. (1987). A surge in inequality. *Scientific American*, *256*(5), 30–37.

Unterhalter, E., & North, A. (2017). *Education, poverty and global goals for gender equality: How people make policy happen*. Routledge.